Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

I. Bagian A - Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini

Kenaikan harga-harga komoditas dan konsumsi swasta telah menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah kondisi global yang sulit; namun tanda-tanda normalisasi permintaan domestik mulai muncul.

Pertumbuhan menguat menjadi 5,3 persen pada tahun 2022, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir dan lebih kuat daripada rata-rata kawasan regional. Pertumbuhan didorong oleh nilai tukar perdagangan (terms-of-trade) yang positif dari ekspor komoditas dan pemulihan konsumsi swasta. Momentum ini berlanjut pada tahun 2023 di mana konsumsi swasta dan ekspor mendukung pertumbuhan 5 persen pada triwulan pertama (Q1-23). Namun, ada tanda-tanda pertumbuhan permintaan domestik mulai melambat. Ini sebagian ditunjukkan oleh penurunan yang cukup besar pada impor dan pertumbuhan investasi, perlambatan pertumbuhan kredit sektor swasta serta perlambatan inflasi inti sejak awal tahun ini.

Inflasi turun lebih cepat daripada yang diantisipasi pasar.

Inflasi utama (headline inflation) turun hingga mencapai 4 persen tahun-ke-tahun (yoy) pada bulan Mei 2023. Ini adalah inflasi terendah yang pernah dicatat sejak puncaknya yang terjadi pada bulan September 2022 ketika tekanan inflasi global meningkat setelah invasi Rusia ke Ukraina. Melambatnya laju inflasi disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan faktor domestik yang berkaitan dengan kebijakan. Ini mencakup penurunan harga minyak dunia, peningkatan hasil panen, intervensi pemerintah di tingkat daerah untuk mengurangi hambatan pasokan terutama untuk pangan dan beras, dan apresiasi Rupiah yang menurunkan biaya impor. Meskipun demikian, peningkatan harga menjadi lebih merata (broad-based), sebagian mencerminkan peningkatan permintaan pada kebanyakan barang dan jasa sehingga inflasi utama dan inti menyatu (converging).

Posisi eksternal Indonesia masih surplus. Pelebaran surplus neraca transaksi berjalan pada awal tahun 2023 terutama disebabkan oleh melemahnya impor barang, bukan peningkatan ekspor.

Pertumbuhan ekspor melambat ketika harga-harga komoditas ekspor andalan seperti batubara, sawit dan logam lain turun, sedangkan kontribusi ekspor manufaktur masih terbatas. Tekanan pembiayaan eksternal juga berkurang karena kebutuhan pembiayaan dapat dikelola dan sumber-sumber pembiayaan stabil. Investasi Asing Langsung (FDI), meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, telah menjadi sumber pembiayaan eksternal yang stabil dalam tiga tahun terakhir dan melebihi pembiayaan dari arus utang dan portofolio yang berjangka lebih pendek dan lebih bergejolak. Sebagai hasilnya, cadangan devisa masih tetap kuat dan mendukung apresiasi Rupiah sejak awal tahun 2023. Selanjutnya, Indonesia menjadi lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Ini terutama disebabkan oleh penurunan utang kepada non-residen sehingga persepsi investor menjadi lebih baik terhadap aset Indonesia, dan nilai tukar menjadi lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Posisi kebijakan fiskal (fiscal stance) menjadi normal yang mencerminkan konsolidasi fiskal yang lebih cepat, diperkuat oleh kenaikan pendapatan secara luas dan belanja publik yang tertahan.

Dengan defisit fiskal sebesar 2,4 persen dari PDB pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah kembali ke mandat/aturan fiskalnya satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan. Pencapaian ini dimungkinkan berkat adanya kinerja pendapatan yang kuat dengan didukung oleh harga-harga komoditas yang tinggi, kenaikan permintaan domestik dan reformasi perpajakan. Selain itu, belanja publik melambat karena penghentian program-program COVID-19, penghapusan sebagian subsidi energi,

dan pelaksanaan investasi publik yang kurang. Keseimbangan fiskal sepanjang tahun 2023 ini bertahan dengan surplus yang mencapai 0,6 persen PDB pada Q1-23, naik dari 0,1 persen PDB pada Q1-22. Sesuai dengan hasil konsolidasi fiskal, utang publik secara bertahap berkurang dan sekarang mencapai 39,2 persen pada bulan Maret 2023. Meskipun demikian, utang publik masih berada di atas level pra-pandemi tahun 2019. Dengan likuiditas yang memadai di pasar domestik dan berakhirnya pembiayaan anggaran oleh BI, komposisi utang publik berubah. Pada Q1-23, utang domestik mencapai 72,1 persen dari total utang publik di mana bank-bank umum menambah pemberian pinjaman kepada pemerintah (sovereign lending).

Meredanya inflasi dan kuatnya arus modal masuk mendorong Bank Indonesia (BI) mengurangi laju pengetatan moneternya.

BI menaikkan suku bunga kebijakannya secara kumulatif sebesar 225 basis points tahun lalu dan mempertahankan suku bunga 5,75 persen sejak Januari 2023. Inflasi terus menurun, dan ekspektasi inflasi kini terkendali dan diharapkan akan turun di bawah target BI pada pertengahan kedua tahun 2023. Selain itu, meskipun rentang suku bunga riil antara suku bunga US Fed dan Indonesia ini tercatat sebagai yang paling rendah dalam sejarah, arus portofolio telah menjadi positif sehingga mendongkrak nilai Rupiah. Melambatnya laju inflasi memberikan ruang kebijakan moneter yang akomodatif kepada BI untuk meredam kenaikan biaya pinjaman dan mendukung pertumbuhan. BI secara aktif telah menggunakan serangkaian tindakan kebijakan untuk menanggulangi tekanan pasar eksternal di tengah berbagai guncangan global yang terjadi secara bersamaan. Ini mencakup menggunakan kombinasi intervensi mata uang asing, suku bunga kebijakan dan fleksibilitas nilai tukar.

Prospek ekonomi masih stabil seraya perekonomian menjadi normal setelah pemulihan pasca pandemi.

Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan melambat menjadi 4,9 persen pada tahun 2023 dan secara umum akan berada di kisaran yang sama di 5 persen dalam jangka menengah. Pertumbuhan akan didukung oleh konsumsi swasta seraya tekanan inflasi berkurang. Neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan mempertahankan surplus kecil (0,02 persen dari PDB) pada tahun 2023 sebelum berubah menjadi defisit 1,0 persen dari PDB pada tahun 2025. Hal ini terjadi setelah adanya perlambatan pertumbuhan ekspor ketika harga sawit dan batubara turun dan permintaan global semakin melemah. Impor juga akan melambat sejalan dengan melambatnya permintaan domestik dan investasi pada tahun 2023. Akan tetapi, perbedaan suku bunga positif dengan AS dan kerangka makro yang stabil diproyeksikan akan terus mendukung arus masuk portofolio. Sebagai hasilnya, cadangan devisa resmi diperkirakan masih cukup untuk membiayai impor selama 6 bulan. Defisit fiskal juga diproyeksikan masih berada di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan aturan fiskal yang telah kembali diterapkan. Ini akan dicapai melalui kenaikan harga-harga komoditas, reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan domestik, dan kebijakan belanja publik yang penuh kehati-hatian.

Meskipun ini adalah hasil yang baik mengingat ketidakpastian global, Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dalam pertumbuhannya, terutama berkaitan dengan penurunan produktivitas.

Potensi pertumbuhan ekonomi (potential GDP growth) terus menurun karena berkurangnya input tenaga kerja, lemahnya pembentukan modal manusia dan lambatnya pertumbuhan produktivitas. Investasi dan, pada tingkat yang lebih rendah, input tenaga kerja telah menjadi pendorong pertumbuhan utama sebelum pandemi tetapi semua pendorong pertumbuhan sekarang melemah, khususnya produktivitas faktor total (TFP). Kontribusi investasi mencapai sekitar 60 persen untuk pertumbuhan pada tahun 2003-2019 dengan kontribusi swasta jauh melebihi kontribusi publik. Ini jauh lebih tinggi daripada kontribusi modal untuk pertumbuhan di Negara-Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah (LMIC) lainnya. Akan tetapi, pertumbuhan TFP melambat hampir setengahnya dalam periode tahun 2010an dibandingkan dengan periode tahun 2000an. Penurunan TFP dan modal manusia ini sejalan dengan pertumbuhan produktivtas tenaga kerja yang lebih rendah, karena hasil dari realokasi

sumber daya di berbagai sektor sepertinya tidak terlihat. Perlambatan realokasi tenaga kerja antar sektor sebagian mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah di sektor jasa dan industri dan penurunan pertumbuhan produktivitas di sektor jasa.

Para pembuat kebijakan dianjurkan untuk memanfaatkan reformasi yang baru-baru ini dilaksanakan dan menerapkan kebijakan ramah-pasar lebih lanjut serta mengurangi kendala persaingan untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas.

Indonesia telah menggabungkan stabilitas ekonomi makro dengan reformasi untuk meningkatkan daya saing selama tiga tahun terakhir. Ini mencakup reformasi-reformasi unggulan seperti omnibus law sektor keuangan dan cipta kerja. Melalui undang-undang ini, tahap selanjutnya adalah untuk dapat mengidentifikasi hambatan spesifik di setiap area kebijakan (misalnya: keuangan, pengadaan, lahan, peraturan bisnis, perdagangan) atau antar sektor yang dapat menghalangi persaingan pasar. Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi pada tahun 2045 jika Indonesia dapat mempertahankan kinerjanya dalam pertumbuhan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sejak 10 tahun terakhir. Tetapi, pertumbuhan selama satu dekade terakhir telah didorong oleh siklus komoditas maupun perbaikan tata kelola, infrastruktur dan akumulasi stabilitas makro. Ke depannya, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan perlu diubah menjadi kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap pasar dan lembaga-lembaga yang dapat mengalokasikan sumber daya untuk penggunaan dengan produktivitas yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing.

II. Bagian B - Langkah Menuju Pemulihan Belajar dan Masa Depan yang Lebih Produktif untuk Anak Indonesia

COVID-19 merupakan sebuah goncangan luar biasa bagi masyarakat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, dan mengganggu proses akumulasi modal manusia di antara anak-anak dan remaja.

Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan dalam proses akumulasi sumber daya manusia, yang berdampak terhadap perkembangan modal manusia para anak dan remaja khususnya dalam proses belajar mengajar Sebelum pandemi COVID-19, krisis pembelajaran sudah terjadi di seluruh dunia, dan selama pandemi, krisis ini semakin mendalam. Penurunan kemampuan akibat COVID-19 juga memperburuk ketidaksetaraan antar negara, yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan serta produktivitas negara di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memitigasi gangguan pembelajaran yang disebabkan oleh COVID-19.

Pandemi COVID-19 mengharuskan ditutupnya (baik secara terbatas maupun penuh) sebagian besar lembaga pendidikan sejak Maret 2020, dengan total 644 hari atau lebih dari 21 bulan penutupan. Ini relatif lama di antara Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah (Lower Middle Income Countries) maupun negara Asia Tenggara lainnya. Pemerintah Indonesia memperkenalkan Kurikulum Darurat dan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Sejak pembukaan kembali semua lembaga pendidikan secara nasional pada Januari 2022, Pemerintah Indonesia telah menekankan pemulihan pembelajaran yang diperkuat melalui serangkaian reformasi pendidikan jangka menengah.

Studi ini menyajikan temuan baru mengenai penurunan kemampuan matematika dan bahasa, dengan membandingkan hasil pembelajaran siswa Kelas 4 sebelum (tahun 2019) dan setelah penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia (tahun 2023).

Di tingkat nasional, siswa kelas 4 di Indonesia pada tahun 2023 kehilangan keterampilan matematika setara 11,2 bulan dan keterampilan bahasa setara 10,8 bulan dibandingkan dengan siswa kelas 4 pada tahun 2019. Siswa dari keluarga miskin/berpenghasilan rendah mengalami dampak yang lebih besar, dengan kehilangan sebesar 18,1 dan 27,2 bulan pembelajaran matematika dan bahasa, mengakibatkan melebarnya ketimpangan hasil belajar. Lama jam pembelajaran, akses rumah tangga ke internet, maupun pengalaman masalah kesehatan atau kematian seseorang yang dekat juga berkorelasi dengan hasil pembelajaran yang lebih rendah dan/atau penurunan kemampuan belajar yang lebih besar.

Sejalan dengan berkembangnya literatur internasional tentang penurunan kemampuan belajar yang diakibatkan pandemi COVID-19, jelas bahwa pendapatan dan produktivitas generasi masa depan Indonesia dapat terpengaruh secara negatif jika langkah-langkah mitigatif tidak dilakukan.

Studi ini menekankan urgensi dalam mengatasi penurunan kemampuan pembelajaran dengan mendorong komitmen politik untuk pemulihan pembelajaran yang mendorong tindakan yang nyata beserta sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan isu yang ada.

Dengan menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014, yang menunjukan relatif lebih rendahnya pendapatan individu dengan kemampuan matematika yang lebih rendah, hilangnya pendapatan diperkirakan dapat mencapai 30,9 persen untuk laki-laki dan 39,2 persen untuk perempuan dibandingkan jika tidak adanya pandemi. Kebijakan pemulihan belajar oleh pemerintah dapat mengurangi kerugian tersebut di masa mendatang.

Komitmen dan tindakan nyata diperlukan mengingat penurunan kemampuan pembelajaran seringkali 'tidak terlihat' bagi banyak pemangku kepentingan, mengakibatkan kembalinya para lembaga pendidikan ke praktek belajar-mengajar seperti biasa tanpa mengatasi tantangan yang ada. Ini mencakup perlunya peningkatan waktu belajar, pengajaran siswa pada tingkat yang tepat, pemantauan kemampuan siswa, dan adanya dukungan pembelajaran yang menargetkan siswa yang menghadapi situasi sulit atau berkemampuan rendah untuk mengatasi ketidakseteraan dalam pembelajaran.